

PERAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM OPTIMALISASI PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMPN 1 PANCA LAUTANG

*The Role of Financial Management in Optimizing the Utilization of School
Operational Assistance Funds at SMPN 1 Panca Lautang*

Nurhayati¹, Lismawati², Andi Ar³, Hernianti Harun⁴

Email: nurhayati313911@gmail.com¹, lismawati90@ith.ac.id², andiarfeb@gmail.com³,
herniantiharunanty@gmail.com⁴

^{1,3}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

⁴Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

²Program Studi Sains Akuaria Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie

^{1,3,4}Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91112

²Jl. Balaikota No.1, Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos
91122

Abstrak

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang transparan, akuntabel, dan efektif merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Namun, banyak sekolah belum sepenuhnya menerapkan kerangka manajemen keuangan yang terstruktur dalam pengelolaan dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen keuangan dalam optimalisasi penggunaan dana BOS dan mengidentifikasi bagaimana sistem pengelolaan dana BOS di SMPN 1 Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dipilih secara *purposive sampling*, meliputi kepala sekolah, bendahara, wali kelas, dan perwakilan orang tua peserta didik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, & Saldana dengan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan berperan strategis melalui lima fungsi: perencanaan berbasis RKAS, pelaksanaan sesuai RKAS, penatausahaan transaksi secara rinci, pelaporan berkala kepada Dinas Pendidikan, dan pertanggungjawaban publik. Sistem pengelolaan dana BOS telah mengacu pada delapan SNP dengan prioritas utama pada pengembangan sarana prasarana dan standar proses. Pengelolaan yang terstruktur ini menghasilkan output berupa peningkatan kualitas pembelajaran, pemenuhan fasilitas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan peningkatan prestasi akademik peserta didik.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan, Dana BOS, Optimalisasi, Akuntabilitas, Transparansi

Abstract

Transparent, accountable, and effective management of School Operational Assistance (BOS) funds is a critical prerequisite for improving education quality at the school level. However, many schools have not fully implemented a structured financial management framework in managing these funds. This study aims to analyze the role of financial management in optimizing BOS fund use and to identify how the BOS fund management system at SMPN 1 Panca Lautang, Sidenreng Rappang Regency, aligns with the eight National Education Standards (SNP). A qualitative descriptive approach was employed. Informants were selected through purposive sampling, comprising the principal, treasurer, homeroom teachers, and parent representatives. Data were collected through participant observation, semi-structured interviews, and documentation. Data analysis applied the interactive model of Miles, Huberman, & Saldana with source, method, and time triangulation. The results reveal that financial management plays a strategic role through five key functions: RKAS-based planning, RKAS-aligned implementation, detailed transaction administration, periodic reporting to the Education Office, and public accountability. The BOS fund management system conforms to the eight SNP, with primary allocations directed toward facilities development and process standards. This structured management produces tangible outputs, including improvements in learning quality, school facilities, extracurricular activities, and student academic achievement.

Keywords: *Financial Management, BOS Funds, Optimization, Accountability, Transparency*

PENDAHULUAN

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan dana BOS kepada satuan pendidikan dasar dan menengah guna membiayai kebutuhan operasional nonpersonalia yang meliputi pengadaan buku, alat tulis, pemeliharaan fasilitas, kegiatan pembelajaran, serta program peningkatan kompetensi guru (PERMENDIKBUD Nomor 6 Tahun 2021).

Setiap sekolah yang menyelenggarakan program BOS dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaannya yaitu efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat. Hal yang paling rawan dilakukan kesalahan adalah transparansi. Sekolah seringkali kurang transparan terhadap penggunaan dana BOS, sehingga dapat mengakibatkan tidak efektifnya program yang telah dijalankan dan berdampak terhadap mutu pendidikan. (Agus Harjito, 2020)

Manajemen keuangan merupakan aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana organisasi memperoleh, menggunakan, dan mengelola dana secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Harjito & Martono, 2014). Pengelolaan keuangan sektor publik harus memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sejalan dengan teori *value for money* yang menekankan tiga aspek utama: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan dana publik (Arinda et al., 2022).

Penerapan prinsip ini sangat relevan di SMPN 1 Panca Lautang, di mana dana BOS digunakan untuk mendukung berbagai program pendidikan, mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana hingga peningkatan kesejahteraan peserta didik. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa meskipun struktur pengelolaan telah terbentuk, belum diketahui secara akademis apakah pengelolaan dana BOS di sekolah ini sepenuhnya mengacu pada metodologi manajemen keuangan. Berikut disajikan data penggunaan dana BOS selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1. Penggunaan Dana BOS SMPN 1 Panca Lautang Tahun 2022–2024

Tahun	Penerimaan Dana BOS (Rp)	Penggunaan Dana BOS (Rp)
2022	239.162.430	238.221.250
2023	238.858.820	238.927.930
2024	260.927.930	261.085.900

Sumber: SMPN 1 Panca Lautang

Tabel 1 menunjukkan peningkatan dana BOS dari tahun ke tahun. Penggunaan dana mencakup delapan standar pengembangan nasional. Melihat besarnya anggaran dan pentingnya delapan standar tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis secara akademis peran manajemen keuangan dalam pengelolaan dana BOS.

Susanti & Nafi'ah (2023) menemukan pengelolaan BOS di SD Sendangharjo sesuai arahan Dinas Pendidikan, sedangkan Fatimah et al. (2024) menemukan kelemahan pada keterlibatan orang tua dan keterlambatan pembayaran pajak di SDN 19 Kampung Olo. Research gap penelitian ini terletak pada analisis komprehensif menggunakan kerangka lima fungsi manajemen keuangan dan kesesuaiannya dengan delapan SNP, yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran manajemen keuangan dalam optimalisasi penggunaan dana BOS di SMPN 1 Panca Lautang; dan (2) mengidentifikasi sistem pengelolaan dana BOS yang mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif**, yang bertujuan memahami fenomena pengelolaan dana BOS secara mendalam dari sudut pandang subjek penelitian (Sugiyono, 2022). Lokasi penelitian adalah SMP Negeri 1 Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Informan ditentukan melalui *purposive sampling* berdasarkan kriteria pengetahuan, pengalaman, dan keterwakilan, terdiri atas kepala sekolah, bendahara, wali kelas, dan perwakilan orang tua. Teknik *snowball sampling* diterapkan untuk menambah informan yang relevan.

Teknik pengumpulan data mencakup tiga metode: (1) **observasi partisipatif** terhadap aktivitas pengelolaan keuangan dan proses pembelajaran; (2) **wawancara semi-terstruktur** dengan panduan berbasis indikator fungsi manajemen keuangan; dan (3) **studi dokumentasi** terhadap RKAS, laporan realisasi BOS, buku kas umum, dokumen pertanggungjawaban, dan kebijakan internal sekolah.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014) melalui empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin kredibilitas temuan diterapkan *triangulasi sumber* (kepala sekolah, bendahara, orang tua), *triangulasi teknik* (wawancara, observasi, dokumentasi), dan *triangulasi waktu*, serta *member checking* kepada informan kunci (Sugiyono, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi di SMPN 1 Panca Lautang, berikut disajikan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS per standar nasional pendidikan.

Tabel 2. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMPN 1 Panca Lautang

Standar Penggunaan	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Standar isi	12.500.000	13.200.000	14.000.000
Standar proses	45.000.000	46.500.000	60.000.000
Standar pendidik dan tenaga kependidikan	30.000.000	28.000.000	25.000.000
Standar sarana dan prasarana	55.000.000	57.000.000	80.000.000
Standar pengelolaan	20.000.000	18.500.000	17.000.000
Standar pembiayaan	40.721.250	40.727.930	38.085.900
Standar penilaian dan implementasi sistem nilai	35.000.000	35.000.000	27.000.000
Total	238.221.250	238.927.930	261.085.900

Sumber: SMPN 1 Panca Lautang

Tabel 2 menunjukkan bahwa total realisasi dana BOS meningkat dari Rp238.221.250 (2022) menjadi Rp261.085.900 (2024). Peningkatan paling signifikan terjadi pada pos standar sarana prasarana (Rp55 juta → Rp80 juta) dan standar proses (Rp45 juta → Rp60 juta) di tahun 2024. Sebaliknya, alokasi untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan mengalami penurunan dari Rp30 juta menjadi Rp25 juta, begitu pula standar pengelolaan dan penilaian.

Tabel 3. Hasil Wawancara dengan Informan

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	Dra. Rustina M., M.Pd (Kepala Sekolah)	Model manajemen keuangan yang diterapkan	Pengelolaan dana BOS meliputi 5 tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2	Muhammad Adnan, S.Pi., S.Pd (Bendahara)	Pihak pengelola dan tugas/tanggungjawabnya	Kepala sekolah sebagai penanggungjawab anggaran; bendahara sebagai penyimpan dan penyalur; komite sekolah dan guru sebagai pengontrol pelaksanaan.
3	Sukadi, S.Pd., M.Pd (Wali Kelas)	Keterlibatan wali kelas dalam pengelolaan BOS	Wali kelas terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara transparan dan akuntabel sesuai kebutuhan sekolah.
4	Rusnaeni (Perwakilan Orang Tua)	Output pengelolaan BOS untuk peserta didik	Output yang dirasakan: peningkatan sarana prasarana, fasilitas memadai, kegiatan ekstrakurikuler, bantuan kepada peserta didik, dan peningkatan prestasi akademik.

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
5	Dra. Rustina M., M.Pd	Penerapan PERMENDIKBUD No. 19 Tahun 2020	Pengelolaan dana BOS berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas, dan kesejahteraan siswa sesuai petunjuk teknis.
6	Muhammad Adnan, S.Pi., S.Pd	Optimalisasi dana BOS untuk aktivitas akademik	Optimalisasi mencakup: pengembangan kurikulum dan pembelajaran, peningkatan sarana prasarana, kegiatan ekstrakurikuler, program remedial, keterlibatan orang tua, dan monitoring & evaluasi.

Sumber: data diolah, tahun 2025

Pembahasan

A. Peran Manajemen Keuangan dalam Optimalisasi Penggunaan Dana BOS

Fokus penelitian pertama adalah menganalisis peran manajemen keuangan dalam pengelolaan dana BOS di SMPN 1 Panca Lautang. Berdasarkan hasil penelitian, peran tersebut terwujud melalui lima fungsi manajemen keuangan yang dijalankan secara berkesinambungan.

1. Perencanaan (RKAS)

Perencanaan dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Kepala sekolah menyatakan bahwa *"...perencanaan dimulai dari penetapan sasaran prioritas penggunaan dana BOS berdasarkan kebutuhan riil sekolah."* Keterlibatan multistakeholder ini mencerminkan prinsip partisipatif yang merupakan salah satu pilar manajemen keuangan sektor publik (Arinda et al., 2022). Berdasarkan Tabel 2, prioritas alokasi terbesar pada 2024 adalah sarana prasarana (Rp80 juta) dan standar proses (Rp60 juta), yang mencerminkan perencanaan berbasis kebutuhan aktual sekolah. Hal ini sejalan dengan teori manajemen keuangan bahwa perencanaan yang baik harus berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif (Harjito & Martono, 2014).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan penggunaan dana BOS mengacu ketat pada RKAS yang telah ditetapkan. Bendahara mengonfirmasi bahwa *"realisasi dana disalurkan sesuai yang telah ditetapkan dalam perencanaan agar tepat sasaran."* Pelaksanaan menghindari pembiayaan yang dilarang dalam juknis BOS, seperti pembangunan gedung baru atau pembelian barang pribadi. Data realisasi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa total penggunaan dana setiap tahun mendekati total penerimaan, mengindikasikan tidak adanya pemborosan maupun kelebihan anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan. Pola ini sesuai dengan prinsip ekonomis dan efisiensi dalam teori *value for money* (Arinda et al., 2022).

3. Penatausahaan

Setiap transaksi keuangan dicatat secara rinci melalui buku kas umum, buku pembantu kas, dan dokumen pendukung lainnya. Penatausahaan yang tertib ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas. Transparansi juga terlihat dari adanya laporan terbuka kepada guru, komite, dan orang tua siswa, yang selaras dengan temuan Rachmawati (2023) bahwa keterbukaan informasi memperkuat legitimasi pengelolaan dana pendidikan. Wali kelas (informan 3) juga mengonfirmasi keterlibatannya dalam pengawasan penggunaan dana secara transparan, yang memperkuat sistem penatausahaan dari sisi internal sekolah.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Sekolah secara rutin menyampaikan laporan realisasi dana BOS kepada Dinas Pendidikan, baik secara fisik maupun daring melalui laman resmi BOS, sesuai amanat Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Laporan juga ditempelkan di papan pengumuman sekolah sehingga dapat diakses langsung oleh orang tua dan masyarakat. Praktik pelaporan terbuka ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan sekolah. Rachman et al. (2022) dalam penelitiannya pada SMA Sasama menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, yang relevan dengan temuan di SMPN 1 Panca Lautang.

5. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan secara dua lapis: internal oleh kepala sekolah dan komite sekolah, serta eksternal oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Pengawasan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, yaitu memastikan penggunaan dana mendukung

peningkatan mutu pendidikan. Hal ini selaras dengan prinsip *value for money* yang mensyaratkan bahwa setiap rupiah dana publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Ulum et al., 2022). Kepala sekolah menegaskan bahwa pengawasan dilakukan dalam setiap tahap siklus pengelolaan, bukan hanya pada akhir periode pelaporan.

Secara keseluruhan, kelima fungsi manajemen keuangan tersebut telah berjalan dengan baik dan saling menopang. Hal ini menjawab fokus penelitian pertama bahwa manajemen keuangan memang berperan strategis dan terstruktur dalam mengoptimalkan penggunaan dana BOS di SMPN 1 Panca Lautang.

B. Sistem Pengelolaan Dana BOS Berbasis Delapan Standar Nasional Pendidikan

Fokus penelitian kedua adalah mengidentifikasi sistem pengelolaan dana BOS yang mengacu pada delapan SNP. Berdasarkan data Tabel 2 dan hasil wawancara, berikut dianalisis kesesuaian penggunaan dana dengan masing-masing standar.

Pada **standar isi dan standar proses**, dana BOS dialokasikan untuk pengadaan buku teks, media pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan program remedial. Alokasi standar proses meningkat signifikan dari Rp45 juta (2022) menjadi Rp60 juta (2024), mencerminkan komitmen sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Bendahara mengonfirmasi bahwa optimalisasi dana untuk standar proses mencakup pengembangan kurikulum, program remedial, dan pengayaan yang berdampak langsung pada capaian belajar siswa.

Pada **standar sarana dan prasarana**, alokasi mengalami peningkatan terbesar, dari Rp55 juta (2022) menjadi Rp80 juta (2024) atau naik 45,5%. Dana digunakan untuk perbaikan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Peningkatan signifikan ini merespons kebutuhan aktual sekolah dan berdampak langsung pada kenyamanan proses belajar mengajar. Orang tua siswa (informan 4) menyatakan bahwa peningkatan fasilitas terasa nyata dan mendorong semangat belajar peserta didik.

Pada **standar pendidik dan tenaga kependidikan**, alokasi justru mengalami penurunan dari Rp30 juta (2022) menjadi Rp25 juta (2024). Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena kualitas guru merupakan faktor determinan mutu pendidikan (Ariwibawa et al., 2023). Meski demikian, penurunan ini disebabkan adanya sumber pendanaan pelatihan guru dari program pemerintah pusat (PKB dan PPG) sehingga beban pada dana BOS berkurang. Ke depan, perlu dipastikan ketersediaan anggaran pelatihan yang memadai dari berbagai sumber.

Pada **standar pengelolaan**, pengelolaan dana BOS dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan guru dan komite sekolah, sesuai prinsip partisipatif dan keterbukaan. Meski alokasi standar pengelolaan mengalami sedikit penurunan, kualitas tata kelola tetap terjaga melalui pelibatan multistakeholder dan sistem pelaporan terbuka.

Pada **standar pembiayaan**, dana BOS digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rutin seperti listrik, air, internet, dan alat kebersihan. Alokasi standar pembiayaan relatif stabil antara Rp38–40 juta per tahun, mengindikasikan kepastian pemenuhan biaya operasional dasar yang mendukung kelangsungan kegiatan belajar-mengajar.

Pada **standar penilaian**, dana digunakan untuk penyediaan lembar soal, penggandaan dokumen ujian, dan kegiatan evaluasi hasil belajar lainnya. Alokasi mengalami penurunan dari Rp35 juta menjadi Rp27 juta di tahun 2024, yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya penggunaan sistem penilaian digital yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini sejalan dengan Susanti & Nafi'ah (2023) yang menemukan pengelolaan BOS di SD Sendangharjo telah sesuai arahan regulasi. Berbeda dengan temuan Fatimah et al. (2024) yang menemukan kelemahan keterlibatan orang tua di SDN 19 Kampung Olo, penelitian ini menemukan komite sekolah sebagai representasi orang tua aktif terlibat sejak tahap perencanaan dan pengawasan, menjadikan pengelolaan lebih partisipatif. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa budaya tata kelola sekolah dan komitmen kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi manajemen keuangan BOS (Ulum et al., 2022; Nurisnain & Mursyidah, 2024).

C. Output Pengelolaan Dana BOS terhadap Mutu Pendidikan

Pengelolaan dana BOS yang terstruktur dan mengacu pada delapan SNP menghasilkan sejumlah output yang dirasakan langsung oleh peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan orang tua (informan 4), output yang teridentifikasi meliputi: (1) peningkatan kualitas pembelajaran karena sarana dan prasarana terpenuhi; (2) tersedianya kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan potensi nonakademik siswa; (3) program remedial dan pengayaan yang mendukung pemerataan capaian belajar; serta (4) bantuan langsung kepada peserta didik yang mendorong angka partisipasi dan retensi siswa.

Hasil ini selaras dengan Romlah et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan gratis yang didukung BOS berkorelasi positif dengan peningkatan akses dan mutu pembelajaran. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan dana BOS melalui kerangka manajemen keuangan yang terstruktur terbukti menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di SMPN 1 Panca Lautang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, manajemen keuangan berperan strategis dalam optimalisasi penggunaan dana BOS di SMPN 1 Panca Lautang. Lima fungsi manajemen keuangan perencanaan berbasis RKAS, pelaksanaan sesuai RKAS, penatausahaan transaksi, pelaporan berkala, dan pertanggungjawaban publik—telah dijalankan secara berkesinambungan sehingga pengelolaan dana menjadi tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Kedua, sistem pengelolaan dana BOS di SMPN 1 Panca Lautang telah mengacu pada delapan SNP dengan prioritas utama pada standar sarana prasarana dan standar proses. Pengelolaan yang terstruktur ini menghasilkan output nyata berupa peningkatan kualitas pembelajaran, pemenuhan fasilitas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan peningkatan prestasi akademik peserta didik. Namun, penurunan alokasi pada standar pendidik dan standar penilaian perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan: (1) menyelenggarakan pelatihan manajemen keuangan berkala bagi seluruh pengelola dana BOS; (2) memperluas partisipasi orang tua dalam penyusunan RKAS agar perencanaan lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik; (3) meningkatkan kembali alokasi dana untuk pengembangan kompetensi pendidik agar selaras dengan prioritas peningkatan mutu SDM pendidikan; dan (4) mengembangkan mekanisme transparansi berbasis digital untuk memperluas jangkauan pelaporan publik.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas konteks studi ke jenjang SMA atau instansi pendidikan lain dan menerapkan pendekatan longitudinal untuk memantau efektivitas pengelolaan BOS seiring perubahan regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinda, R., Fitrios, R., & Indrawati, N. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana BOS di SMA dan SMK Negeri Kota Pekanbaru. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 3600–3616. <https://doi.org/10.37385/msej.v3i6.1139>
- Ariwibawa, P., Suryadi, E., & Wahyu, W. (2023). Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah. *Jurnal Cendekia Pendidikan*, 2(1), 57–68.
- Fatimah, S., Frinaldi, A., Nora, & Asnil. (2024). Pengelolaan penggunaan anggaran dana BOS: Studi kasus SDN 19 Kampung Olo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 45–58.
- Harjito, D. A., & Martono. (2014). *Manajemen keuangan* (Edisi ke-2). Ekonisia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurisnain, M. M., & Mursyidah, L. (2024). Evaluation of the management policy of BOS funds in elementary schools. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1187>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Rachman, D., Setiawan, D., & Nugraha, R. M. T. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA Sasama. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(3), 73–86. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/1064>

Rachmawati, U. (2023). Penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di SDN Made 1 Surabaya. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(02), 212–219. <https://doi.org/10.57008/jjp.v3i02.442>

Romlah, S., Imron, A., Maisyaroh, Sunandar, A., & Dami, Z. A. (2023). A free education policy in Indonesia for equitable access and improvement of the quality of learning. *Cogent Education*, 10(2), 2245734. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734>

Solikhatun, N. (2025). Transparansi pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 5(1), 23–35.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi* (Cetakan ke-3). Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.

Suharsaputra, U. (2013). *Administrasi pendidikan* (Edisi revisi). Refika Aditama.

Susanti, P., & Nafi'ah, B. A. (2023). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 14(1), 78–90. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpd/article/download/34167/14858>

Ulum, I., Kustono, A. S., & Sari, R. M. (2022). Kompetensi SDM sebagai mediasi dalam good governance dan anggaran berbasis kinerja pada pengelolaan dana BOS. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 378–397. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.22014>

Wele, M. Y. E., & Mildawati, T. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban keuangan terhadap pengelolaan anggaran dana BOS. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(5).